Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34354-34359

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Warga Dalam Meningkatkan Pemasukan Kas Desa Buntu Pane Kabupaten Asahan

Ryan Firmansyah[1], Zoraya Alfathin Rangkuti[2]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
Email: zorayarankuti@usu.ac.id*, ryanfirmansyah.search@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan BUMDes Bina Warga dalam meningkatkan pendapatan Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan. BUMDes berperan penting dalam mendorong ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi kendala transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dan Purnomo (2016) yang menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMDes itu ialah dengan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel,dan Sustainable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes mengelola dua unit usaha, yaitu layanan internet (Wi-Fi) dan florist (papan bunga). Usaha Wi-Fi tergolong berhasil karena membantu masyarakat dengan harga terjangkau, sedangkan florist tidak berlanjut akibat kurangnya tenaga ahli dan partisipasi warga. Permasalahan utama terletak pada minimnya sosialisasi, keterlibatan masyarakat, dan keterbukaan informasi keuangan. Berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes, aspek partisipatif, emansipatif, dan transparansi masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan sosialisasi serta pengelolaan yang lebih terbuka agar BUMDes lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kas desa secara optimal.
Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Desa Buntu Pane.

ABSTRACT

This study analyzes the management of BUMDes Bina Warga in improving the revenue of Buntu Pane Village, Asahan Regency. BUMDes plays an important role in promoting the local economy and community welfare, yet it still faces challenges related to transparency, participation, and business sustainability. The research employs a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation involving village officials and local residents. This study refers to the theories proposed by the Center for Development System Dynamics Studies (2007) and Purnomo (2016), which state that BUMDes management should be based on the principles of cooperation, participation, emancipation, transparency, accountability, and sustainability. The results show that BUMDes manages two business units: internet services (Wi-Fi) and a florist (flower board). The Wi-Fi business has been successful in providing affordable internet access to the community, while the florist business was discontinued due to a lack of skilled workers and community participation. The main problems identified include limited socialization, low public involvement, and insufficient financial transparency. Based on the BUMDes management principles, the participatory, emancipatory, and transparency aspects need to be strengthened. Therefore, increasing socialization and adopting more transparent management are necessary to ensure BUMDes sustainability and optimize village revenue growth.
Keywords: BUMDes, Management, Community Participation, Transparency, Buntu Pane Village.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dari peran tersebut, lahirlah konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memperkuat perekonomian dan meningkatkan kemandirian masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara produktif. Kehadiran BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting bagi pembangunan

ekonomi desa. Melalui pengelolaan unit usaha seperti jasa, perdagangan, dan pariwisata, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sekaligus membuka peluang kerja bagi warga.

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak BUMDes menghadapi kendala seperti lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. BUMDes Bina Warga di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, menjadi salah satu contoh yang masih menghadapi tantangan tersebut. BUMDes ini mengelola dua unit usaha, yaitu layanan internet (Wi-Fi) dan florist (papan bunga). Usaha Wi-Fi berjalan cukup baik karena membantu masyarakat dengan harga terjangkau, terutama di wilayah yang sulit akses internet. Sebaliknya, usaha florist tidak dapat berlanjut karena kekurangan tenaga ahli dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat BUMDes kepada masyarakat serta belum maksimalnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha menjadi rendah, dan potensi BUMDes untuk berkontribusi lebih besar terhadap kas desa belum sepenuhnya tercapai. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan usaha desa. Tanpa adanya transparansi dan komunikasi yang baik, sulit bagi BUMDes untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari warga.

Untuk itu, pengelolaan BUMDes perlu memperkuat penerapan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh teori Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dan Purnomo (2016). Pemerintah desa perlu meningkatkan pelatihan, pendampingan, dan akses modal bagi pengelola BUMDes agar mampu bekerja secara profesional. Sementara itu, masyarakat juga harus didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan pengawasan BUMDes. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan desa, serta menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh. Lokasi penelitian berada di Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari kepala desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian. Informan terdiri atas informan kunci, utama, dan pendukung sesuai tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan BUMDes. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BUMDes Bina Warga

BUMDes Bina Warga merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dan menjadi fokus penelitian ini. BUMDes ini memiliki dua unit usaha utama, yaitu layanan internet (Wi-Fi) dan florist (papan bunga). Usaha Wi-Fi dipilih karena kondisi geografis desa yang berada di wilayah perkebunan dengan akses internet terbatas, sehingga keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan tarif terjangkau Rp125.000 per bulan untuk kecepatan 20 Mbps, layanan ini memberikan manfaat besar bagi warga desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan, seperti kurangnya aktivitas operasional dan kantor yang jarang buka, sehingga masyarakat menilai pengelolaan belum optimal.

BUMDes Bina Warga memiliki visi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pelayanan dan perdagangan guna mewujudkan desa yang mandiri. Visi tersebut didukung dengan misi membangun kerja sama ekonomi, memberikan

pelayanan usaha dan jasa kepada masyarakat, serta mengembangkan kegiatan ekonomi lokal agar lebih maju. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari dewan pengawas dan pengurus aktif yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan visi, misi, dan struktur yang jelas, BUMDes Bina Warga diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi di BUMDes Bina Warga Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pengelolaan usaha desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, ditemukan bahwa sosialisasi BUMDes kepada masyarakat masih tergolong kurang. Banyak warga yang hanya mengetahui keberadaan BUMDes secara umum tanpa memahami tujuan, fungsi, dan kegiatan usaha yang dijalankan. Kepala Desa Buntu Pane menyampaikan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia yang masih terbatas, serta belum maksimalnya penyebaran informasi dari pihak pengelola.

Secara umum, kegiatan BUMDes Bina Warga berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Kurangnya sosialisasi membuat sebagian warga tidak merasa memiliki atau terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi desa ini. Hal tersebut berdampak pada kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan transparansi dari pihak pengelola menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan antara BUMDes dan warga desa.

2.1 Keberlanjutan

Keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan BUMDes agar usaha yang dijalankan bisa bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa unit usaha BUMDes seperti papan bunga sudah tidak lagi beroperasi karena kurangnya tenaga kerja dan minat masyarakat untuk melanjutkannya. Selain itu, masyarakat hanya sekadar tahu keberadaan BUMDes tanpa memahami manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari keberadaan lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi usaha desa.

Padahal, penerapan prinsip keberlanjutan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat desa. Ketika warga ikut berperan dalam pengelolaan usaha, akan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta rasa memiliki terhadap BUMDes itu sendiri. Selain itu, usaha yang berkelanjutan juga dapat memperkuat daya saing BUMDes di tengah perkembangan ekonomi global. Namun, lemahnya komunikasi dan kurangnya inisiatif dari pengurus membuat potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, keterbukaan dan kolaborasi aktif antara pengurus dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan BUMDes.

2.2 Partisipatif

Konsep partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Buntu Pane masih rendah. Berdasarkan wawancara dengan Direktur BUMDes, belum ada pihak luar seperti lembaga pendidikan atau perusahaan yang memberikan dukungan atau bantuan untuk pengembangan usaha desa. Masyarakat pun cenderung acuh dan tidak merasa dilibatkan dalam pengelolaan, sehingga hanya segelintir orang yang benar-benar memahami kegiatan BUMDes.

Kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada minimnya ide, inovasi, dan bantuan modal bagi BUMDes. Padahal, partisipasi aktif tidak hanya membantu memperluas jaringan dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan keterampilan warga dalam mengelola usaha. Kolaborasi antara BUMDes, pihak swasta, dan masyarakat dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan demikian, peningkatan partisipasi bukan hanya soal keikutsertaan, tetapi juga tentang membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk memajukan ekonomi desa.

2.3 Emansipatif

Prinsip emansipatif menekankan kesetaraan dalam pengelolaan BUMDes, di mana semua warga memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial, agama, atau golongan. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan di BUMDes Bina Warga. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, tidak pernah ada ajakan atau kesempatan bagi warga untuk

turut serta dalam kegiatan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat masih pasif dan terbatas pada kelompok tertentu saja yang terlibat dalam pengelolaan.

Kondisi tersebut menandakan bahwa BUMDes belum mampu menjadi wadah pemberdayaan yang inklusif bagi seluruh warga desa. Padahal, penerapan prinsip emansipatif sangat penting agar masyarakat merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang bersama BUMDes. Dengan membuka ruang partisipasi yang setara, BUMDes dapat menjadi sarana pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa. Tanpa adanya keadilan dan keterbukaan, sulit bagi BUMDes untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

2.4 Transparansi

Transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pengurus BUMDes dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, keterbukaan informasi di BUMDes Bina Warga masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas penggunaan dana, sumber pendapatan, maupun laporan keuangan BUMDes. Informasi biasanya hanya diterima oleh segelintir orang yang mendapat undangan resmi, sementara warga lainnya tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Kurangnya koordinasi antara pengurus dan perwakilan masyarakat juga menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik.

Minimnya transparansi ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Ketika warga tidak mengetahui bagaimana dana dikelola, mereka cenderung tidak tertarik untuk mendukung atau berinvestasi. Padahal, keterbukaan dalam laporan keuangan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan rasa percaya. Dengan menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh, BUMDes tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membangun kolaborasi yang sehat antara pengurus dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan ekonomi desa.

3. Pembahasan

Pengelolaan yang baik menjadi kunci utama keberhasilan BUMDes sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bina Warga telah berhasil menjalankan usaha penyediaan layanan wifi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah perkebunan yang sulit akses internet. Namun, usaha florist tidak dapat bertahan karena minim tenaga ahli dan rendahnya minat masyarakat. Jika dibandingkan dengan BUMDes lain seperti di Desa Prapat Janji dan Desa Sionggang, kelemahan utama BUMDes Bina Warga terletak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Selain itu, meskipun aktivitas berjalan lancar, kinerja keuangan belum optimal akibat kurangnya inovasi, pelatihan, dan kapasitas manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh jenis usaha, tetapi juga oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat dan profesionalisme pengelolaan dapat diterapkan.

3.1 Keberlanjutan

BUMDes Bina Warga menjalankan dua unit usaha utama, yaitu penyediaan layanan wifi dan florist (papan bunga). Usaha wifi tergolong sukses karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta memberikan pemasukan bagi kas desa. Sebaliknya, usaha florist gagal berlanjut akibat kurangnya tenaga ahli dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pembukuan, pendapatan tahunan BUMDes selama tiga tahun terakhir berkisar antara Rp10.200.000–Rp10.867.000, menunjukkan adanya kontribusi meski belum maksimal. Dari modal awal Rp300.000.000, pengelolaan sudah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini menandakan bahwa meskipun BUMDes sudah berjalan, masih diperlukan peningkatan manajemen agar lebih berkelanjutan dan berdampak besar pada PAD.

Tabel 3.1 Target BUMDes Bina Warga

Target BUMDes	Realisasi BUMDes
Meningkatkan pemasukan Kas / PAD	Belum optimal
Menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai pihak	Belum terealisasi
Menciptakan jaringan secara menyeluruh sampai ke pelosok	Terealisasi dengan baik
Menyediakan internet dengan harga terjangkau	Terealisasi dengan baik

oleh masyarakat	
Berdampak bagi anak-anak sekolah SMP	Terealisasi dengan baik

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.2 Transparansi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa modal awal sebesar Rp300.000.000 berasal dari 20% APBDes dan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes. Meskipun usaha wifi memberikan manfaat besar seperti pembangunan tugu desa dan pemberian hadiah untuk siswa, pengelolaan keuangan masih menghadapi kendala transparansi dan partisipasi. Kurangnya pelibatan masyarakat menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui kondisi keuangan BUMDes secara jelas. Keberhasilan peningkatan kas desa sangat bergantung pada sejauh mana pengelolaan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, BUMDes dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Tabel 3.2 Perbandingan Teori dengan Masalah di BUMDes Bina Warga

Prinsip Pengelolaan	Teori	Masalah
Keberlanjutan	Usaha harus dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Usaha florist tidak berlanjut karena kurang pembeli dan tenaga kerja, menurunkan potensi pendapatan.
Partisipatif	Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan untuk menumbuhkan rasa memiliki.	Partisipasi masyarakat rendah dan tidak merasa dilibatkan dalam keputusan BUMDes.
Emansipatif	Masyarakat harus diberdayakan sebagai pelaku aktif, bukan sekadar penerima manfaat.	Warga tidak merasa diberdayakan dan kurang tahu program BUMDes.
Transparansi	Pengelolaan harus terbuka, dengan informasi jelas dan mudah diakses semua pihak.	Kurangnya keterbukaan dalam laporan keuangan dan informasi kegiatan BUMDes.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengelolaan BUMDes Bina Warga di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Saat ini, BUMDes masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, lemahnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya pemahaman warga terhadap peran dan manfaat BUMDes. Padahal, BUMDes Bina Warga memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama melalui unit usaha layanan internet dan florist yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam manajemen, sosialisasi yang lebih intensif, serta upaya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar BUMDes dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, T. (2012). Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi.

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).(2020) Desa Internet Mandiri 2020: Model Pengembangan Internet Desa melalui BUMDes. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Desa, Vol. 3, No. 1

Aras, A., & Prasetyo, K. B. (2025). Transformasi Digital Di Pedesaan: Peran Bumdes Dalam Penguatan Akses Internet Warga Desa Krocok Kabupaten Blora. Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, 8(2), 79-101.

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

Aulia, P. C. S. (2022). Pemberdayaan Jasa Pelayanan Jaringan Internet Melalui Bumdes Liku Sembilan Di Dinas Pmd Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Nugroho, Riant. (2018). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen
Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi. (2024). (n.p.): CV. AZKA PUSTAKA.
Pengantar Manajemen. (2025). (n.p.): PT Arr Rad Pratama.
Pengantar Manajemen: Teori Praktik Dan Tantangan Terkini. (2023). (n.p.): Takaza Innovatix Labs.
Peraturan Desa tentang BUMDes (PERDES) terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.
Sedarmayanti. 2020. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Bandung : Mandar Maju.